

DISERTASI
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

ISMANTO
2341214310003



PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2026

DISERTASI

**OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh :

NAMA : ISMANTO
NIM 2341214310003

Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi : Optimalisasi Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan Republik
Indonesia
Nama : Ismanto
NIM : 2341214310003

Disetujui untuk Ujian Terbuka,
Pada Tanggal.... 30 April 2026....

Promotor



Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Co-Promotor



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Plt. Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismanto
~ : 2341214310003
Program Studi : Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : "OPTIMALISASI TOGAS DAN FUNGSI INTELIJEN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarbaru, 10 April 2026
Yang membuat pernyataan



Ismanto
~ 2341214310003

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan pemilik alam semesta ini karena atas rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun Disertasi pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat ini dengan judul “OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, penulis mengharapkan jika ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Disertasi ini. Diselesaikannya Disertasi ini tidak terlepas juga dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM
3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Co. Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, revisi, dan catatan-catatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
5. Seluruh Dosen pengasuh matakuliah di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Asisten Intelijen, serta seluruh rekan-rekan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan atas bantuan data, informasi, serta kerjasama selama proses pengumpulan data lapangan.
7. Orangtua yang selalu memberikan semangat, doa serta motivasi yang tiada henti sehingga dapat penulis menyelesaikan penelitian ini.
8. Isteri Tercinta, Noor Lelasari dan anak-anak Dyka Pratama Adhyaksa serta Rizky Wira Adhyaksa, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat tanpa henti di setiap langkah perjalanan penulis.
9. Teman-teman penulis di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM angkatan III dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Akhir kata, semoga Disertasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 10 April 2026

Penulis



Ismanto

Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

ISMANTO

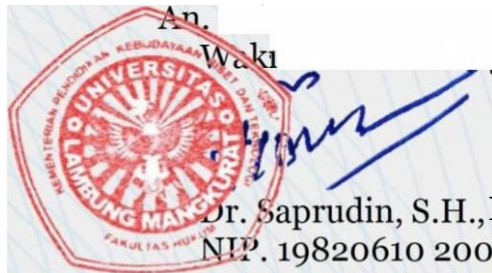
2341214310003

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

5 %

Banjarmasin, 9 Januari 2025

Mengetahui,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200 011 002

Akademik,

Ko
Fa

Tugas Akhir Mahasiswa
M

A blue ink signature is written over a light blue rectangular background.

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

Oleh: Ismanto

Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya fungsi dan kewenangan intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem penegakan hukum, yang ditandai dengan ketidakjelasan pengaturan normatif, lemahnya integrasi kelembagaan, serta belum maksimalnya peran dalam deteksi dini dan pencegahan kejahatan. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum cenderung bersifat reaktif dan belum berbasis analisis intelijen secara sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat fungsi dan kewenangan intelijen Kejaksaan, mengkaji implikasi yuridis atas kelemahan yang ada, serta merumuskan reformulasi fungsi dan kewenangan intelijen Kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, khususnya dengan sistem hukum Prancis dan Belanda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intelijen Kejaksaan memiliki karakteristik sebagai intelijen yustisial yang berorientasi pada penegakan hukum dan berbeda dengan intelijen lembaga lain yang berfokus pada keamanan negara atau ketertiban umum. Namun demikian, kelemahan pengaturan fungsi dan kewenangan intelijen Kejaksaan menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum, potensi tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya pemanfaatan intelijen dalam proses penegakan hukum.

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan reformulasi fungsi dan kewenangan intelijen Kejaksaan melalui penguatan konsep intelijen yustisial yang terintegrasi, penerapan pendekatan *intelligence-led law enforcement*, serta pembentukan regulasi operasional dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung. Selain itu, penelitian ini merumuskan Model Intelijen Yustisial Kejaksaan Terintegrasi yang mengintegrasikan intelijen dalam deteksi dini, pencegahan kejahatan, dan proses penegakan hukum secara sistematis. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis melalui pengembangan konsep intelijen yustisial serta kontribusi praktis berupa model operasional dan rancangan regulasi yang dapat diimplementasikan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

SUMMARY

By: Ismanto

***Doctoral Program in Law Study Program, Faculty of Law, Lambung
Mangkurat University***

This research is motivated by the suboptimal function and authority of the Prosecutorial Intelligence of the Republic of Indonesia within the law enforcement system. This condition is reflected in the lack of clear normative regulation, weak institutional integration, and the limited role of intelligence in early detection and crime prevention. As a result, law enforcement tends to be reactive and not fully based on systematic intelligence analysis.

This study aims to analyze the nature of the function and authority of prosecutorial intelligence, examine the juridical implications of its weaknesses, and formulate a reformulation of its role in supporting law enforcement. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches, particularly by examining the legal systems of France and the Netherlands.

The findings reveal that prosecutorial intelligence has a distinctive characteristic as judicial intelligence, which is oriented toward law enforcement and differs from intelligence functions in other institutions that focus on national security or public order. However, weaknesses in its regulatory framework lead to juridical implications such as legal uncertainty, potential overlapping of authority, and the ineffective use of intelligence in the law enforcement process.

As a solution, this research proposes a reformulation of prosecutorial intelligence functions and authority through the strengthening of judicial intelligence concepts, the application of an intelligence-led law enforcement approach, and the establishment of operational regulations in the form of a Prosecutor General Regulation. Furthermore, this study introduces the Integrated Judicial Intelligence Model of the Prosecutor's Office, which systematically integrates intelligence into early detection, crime prevention, and law enforcement processes. This research contributes theoretically through the development of the judicial intelligence concept and practically through an operational model and regulatory framework that can be implemented within Indonesia's law enforcement system.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya fungsi dan kewenangan intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem penegakan hukum, yang disebabkan oleh ketidakjelasan pengaturan normatif, keterbatasan integrasi kelembagaan, serta lemahnya peran dalam deteksi dini dan pencegahan kejahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat fungsi dan kewenangan intelijen Kejaksaan, mengkaji implikasi yuridis atas kelemahan yang ada, serta merumuskan model reformulasi yang efektif dalam mendukung penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, khususnya dengan sistem hukum Prancis dan Belanda. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intelijen Kejaksaan memiliki karakteristik sebagai intelijen yustisial yang berorientasi pada penegakan hukum, berbeda dengan intelijen pada lembaga lain yang berfokus pada keamanan negara atau ketertiban umum. Namun demikian, kelemahan pengaturan fungsi dan kewenangan intelijen Kejaksaan menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum, potensi tumpang tindih kewenangan, serta tidak optimalnya pemanfaatan intelijen dalam proses penegakan hukum.

Penelitian ini menawarkan reformulasi fungsi dan kewenangan intelijen Kejaksaan melalui penguatan konsep intelijen yustisial yang terintegrasi dalam sistem penegakan hukum, didukung oleh mekanisme operasional berbasis *intelligence-led law enforcement* serta pembentukan regulasi teknis dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung. Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan Model Intelijen Yustisial Kejaksaan Terintegrasi yang mengintegrasikan fungsi intelijen dalam deteksi dini, pencegahan kejahatan, dan proses penegakan hukum secara sistematis.

Kata kunci: intelijen kejaksaan, intelijen yustisial, penegakan hukum, reformulasi hukum, deteksi dini.

ABSTRACT

This research is motivated by the suboptimal function and authority of the Prosecutorial Intelligence of the Republic of Indonesia within the law enforcement system, which is caused by the lack of clear normative regulation, limited institutional integration, and weak roles in early detection and crime prevention. This study aims to analyze the nature of the function and authority of prosecutorial intelligence, examine the juridical implications of its weaknesses, and formulate an effective model for strengthening its role in supporting law enforcement.

This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches, particularly by examining the legal systems of France and the Netherlands. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed using a descriptive-analytical method.

The findings indicate that prosecutorial intelligence possesses a distinctive characteristic as judicial intelligence, which is oriented toward law enforcement, distinguishing it from intelligence functions in other institutions that focus on national security or public order. However, the weaknesses in regulating its functions and authority result in juridical implications, including legal uncertainty, potential overlapping of authority, and the ineffective use of intelligence in the law enforcement process.

This study proposes a reformulation of prosecutorial intelligence functions and authority through the strengthening of judicial intelligence concepts integrated within the law enforcement system, supported by an intelligence-led law enforcement approach and the establishment of technical regulations in the form of a Prosecutor General Regulation. The novelty of this research lies in the development of the Integrated Judicial Intelligence Model of the Prosecutor's Office, which systematically integrates intelligence functions into early detection, crime prevention, and law enforcement processes.

Keywords: *prosecutorial intelligence, judicial intelligence, law enforcement, legal reformulation, early detection.*

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Perbandingan Karakteristik dan Fungsi Intelijen pada Lembaga Negara di Indonesia.....	170
4.2. Perbandingan Integrasi Intelijen dalam Sistem Penegakan Hukum di Prancis, Belanda, dan Indonesia	279

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN (COVER)	i
HALAMAN DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
SERTIFIKAT PLAGIASI	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teoritik	15

DAFTAR ISI

1. <i>Grand Theory</i> : Teori Ketertahanan dan Ketentaraman Umum	15
2. <i>Middle Range Theory</i> : Teori Intelijen	45
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Penegakan Hukum	73
B. Landasan Konseptual	102
C. Bagan Kerangka Pikir	104
D. Definisi Opsional/Konseptual	105
BAB III : METODE PENELITIAN	153
A. Jenis Penelitian.....	153
B. Sifat Penelitian	153
C. Tipe dan Pendekatan penelitian	154
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	157
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	159
F. Analisis Bahan Hukum	159
G. Sistematika Penulisan	160
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	163
A. Hakikat Fungsi Dan Kewenangan Intelijen Kejaksaan yang Membedakan Dengan Fungsi Intelijen Pada Lembaga Lain.....	163
1. Badan Intelijen Di berbagai Lembaga Negara	163
2. Hakikat Fungsi Intelijen di Lembaga Kejaksaan.....	172
3. Hakikat Kewenangan Intelijen di Lembaga Kejaksaan.....	180
B. Dampak Yuridis Adanya Kelemahan Fungsi Dan Kewenangan Intelijen Kejaksaan.....	186
1. Aturan Yuridis Fungsi Intelijen di lembaga Kejaksaan	186
2. Aturan Yuridis Kewenangan Intelijen di lembaga Kejaksaan	203
3. Kelemahan dan Kelebihan Intelijen Lembaga Kejaksaan.....	213

C. Reformasi Hukum Bagi Operasi Intelijen Kejaksaan Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Kejahatan Serta Mendukung Proses Penegakan Hukum.....	247
1. Operasi Intelijen Kejaksaan dalam Deteksi dan Mencegah Kejahatan	247
2. Perbandingan Operasi Intelijen Kejaksaan dalam Sistem Penegakan Hukum dengan Negara Lain.....	273
3. Reformulasi Fungsi dan Kewenangan Intelijen Kejaksaan Berbasis Intelijen Yustisial dalam Sistem Penegakan Hukum	281
BAB V : Penutup	307
A. Kesimpulan.....	307
B. Saran.....	309

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISI